

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN "SELASA PARIWISATA"

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pariwisata adalah sector yang sangat tergantung pada citra (*image*). kegiatan Pariwisata sangat rentan dengan isu, khususnya isu negative, yang dapat memberi dampak yang sangat besar terhadap pariwisata. Isu negatif dapat memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. seperti: penurunan jumlah wisatawan, kerugian ekonomi dampak terhadap citra destinasi, peningkatan biaya promosi dan pemulihan, pengaruh pada investasi, Perubahan Tren Wisatawan.

Isu negatif, bisa berbentuk bencana alam, krisis kesehatan (misalnya pandemi), ketegangan politik, atau masalah keamanan, dan lain-lain. hal ini dapat menurunkan kepercayaan wisatawan. Jika informasi buruk tentang destinasi tersebar luas, orang akan cenderung menghindari tempat tersebut karena khawatir akan keselamatan atau kenyamanan mereka. Turunnya jumlah wisatawan akan berpengaruh langsung pada pendapatan dari sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, dan atraksi wisata. Hal ini juga berdampak pada pekerjaan yang bergantung pada pariwisata, seperti pemandu wisata, petugas hotel, dan pedagang lokal. Isu negatif dapat merusak citra suatu destinasi dalam jangka panjang. Misalnya, jika suatu tempat sering digambarkan dengan hal-hal negatif dalam media (seperti kecelakaan wisata atau masalah sosial), citra destinasi tersebut bisa terganggu, bahkan jika masalahnya hanya bersifat sementara. Jika ada isu negatif, destinasi perlu melakukan upaya pemulihan citra melalui kampanye promosi yang intensif. Biaya untuk memulihkan citra ini sering kali sangat tinggi, dan hasilnya belum tentu langsung terlihat. Ketika isu negatif berkembang, investor mungkin enggan berinvestasi di sektor pariwisata di area tersebut. Ini bisa menghambat pembangunan infrastruktur atau fasilitas baru yang dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata. Wisatawan bisa saja mengalihkan perhatiannya ke destinasi lain yang lebih aman atau lebih menarik. Misalnya, setelah munculnya isu terkait lingkungan atau sosial,

wisatawan mungkin memilih tempat yang dianggap lebih ramah lingkungan atau lebih aman.

Secara keseluruhan, isu negatif dapat memengaruhi seluruh ekosistem pariwisata, dari pengusaha lokal hingga pemerintah, dan membutuhkan strategi penanganan yang hati-hati untuk mengurangi dampaknya. Untuk menjaga kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata bali, maka Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, harus segera memberi klarifikasi ke masyarakat dunia jika terdapat isu yang merebak, sehingga masyarakat dunia akan menjadi percaya jika mendapat penjelasan yang resmi dari pemerintah.

Untuk membahas isu-isu yang berkembang, Dinas Pariwisata Provinsi Bali membuat sebuah forum komunikasi public yang bersifat rutin, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, pada hari Selasa, paling tidak sekali dalam sebulan yang disebut **Selasa Pariwisata**.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan "Selasa Pariwisata" memiliki tujuan yaitu:

- a. Sebagai media berkoordinasi antar stakeholders pariwisata dalam memecahkan permasalahan di bidang kepariwisataan
- b. Sebagai media untuk mencari solusi setiap permasalahan yang timbul di dunia kepariwisataan di Bali
- c. Mempercepat penyelesaian masalah sehingga tidak berlarut-larut.
- d. Sebagai media klarifikasi, terkait isu-isu yang berkembang
- e. Sebagai media sosialisasi dan publikasi setiap kebijakan pemerintah yang harus disampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat pariwisata.

3. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Juknis Selasa Pariwisata adalah proses pelaksanaan kegiatan Selasa Pariwisata dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.,

4. Pengertian Umum.

Sebelum dibahas secara rinci apa itu kegiatan Selasa Pariwisata, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan "Selasa Pariwisata". Yang dimaksud dengan Selasa Pariwisata adalah sebuah kegiatan diskusi yang

membahas dan mencari solusi terkait dengan isu-isu terkait kepariwisataan yang dilaksanakan pada hari Selasa. Hari Selasa dipilih sebagai hari kegiatan karena hari Selasa dianggap hari paling ideal, karena merupakan hari di awal minggu tetapi bukan hari pertama. Jika dilaksanakan di hari pertama maka tidak akan cukup waktu untuk melakukan persiapan, karena hari sebelumnya adalah hari libur. maka dari itu dipilihlah hari Selasa,

BAB II

PENYELENGGARAAN "SELASA PARIWISATA"

1. Perencanaan

- a. Pada tahap perencanaan dilaksanakan pengumpulan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan kepariwisataan. Isu-isu dikumpulkan dari media massa baik media cetak, media elektronik, media online dan media sosial maupun yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat. Dari isu yang dikumpulkan kemudian dipilih dan dianalisis sehingga didapatkan isi yang paling mendesak untuk dicarikan jalan keluar.
- b. menentukan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam pembahasan isu.
- c. menentukan tanggal pelaksanaan.
- d. mengundang pemangku kepentingan
- e. menyusun rundown kegiatan
- f. menentukan narasumber
- g. mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan diskusi/sosialisasi sesuai jumlah peserta.

2. Pihak-pihak yang dilibatkan

- a. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
 - merangkum semua isu terkait pariwisata Bali, yang muncul baik di media, media social maupun di masyarakat luas.
 - memilih isu, mana yang sifatnya mendesak dan diprediksi menimbulkan dampak yang paling serius.
 - menyiapkan bahan paparan untuk kegiatan Selasa Pariwisata
 - menyelenggarakan Komunikasi Publik, dengan melibatkan stakeholders terkait
 - merangkum hasil diskusi.
 - menyampaikan hasil diskusi kepada stakeholders terkait untuk ditindaklanjuti.
 - menyampaikan kepada media, terkait solusi yang diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan.

- mempublikasikan hasil diskusi atau sosialisasi di media baik media cetak, elektronik dan media lainnya
- b. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang sesuai tupoksi, serta kewenangan yang dimiliki.
 - mencari solusi terkait isu yang berkembang sesuai tupoksi dan kewenangan.
 - menindaklanjuti solusi yang diambil dalam diskusi sesuai tupoksi dan kewenangan.
 - melaporkan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan.
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Bali.
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang sesuai lokasi .
 - ikut mencari solusi terkait isu yang berkembang
 - menindaklanjuti solusi yang diambil dalam diskusi sesuai tupoksi dan kewenangan.
 - mengkoordinasikan dengan OPD terkait yang ada di Kabupaten/Kota.
 - melaporkan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan.
- d. Kepolisian Daerah Bali
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang
 - menindaklanjuti hasil diskusi, dengan melakukan penegakan hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kantor Imigrasi
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang
 - menindaklanjuti hasil diskusi, dengan melakukan penegakan hukum keimigrasian terkait keimigrasian.
- f. Kantor Hukum dan Ham Provinsi Bali
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang
 - menindaklanjuti hasil diskusi, dengan melakukan penegakan hukum,
- g. Asosiasi Pariwisata
- menampung semua keluhan wisatawan
 - berpartisipasi dalam memantau isu yang berkembang di tempat usaha

- melaporkan isu terkait pariwisata yang terjadi di lingkungan tempat usaha, kepada pemerintah, melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang.
- melaksanakan segala rekomendasi pemerintah terkait penyelesaian isu.

h. Akademisi

- memberikan masukan dan saran terkait isu yang berkembang sesuai kajian akademis.
- ikut mencari solusi terkait isu yang berkembang sesuai kajian akademis.

i. Masyarakat.

- melaporkan setiap kejadian yang terjadi kepada penegak hukum terdekat.
- menindaklanjuti hasil diskusi yang sudah dituangkan di dalam aturan.
- menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

j. Wisatawan

melaporkan setiap kejadian yang menyimpannya kepada saluran terdekat, baik hotel, travel agent, guide maupun penegak hukum.

k. Media.

mempublikasikan solusi yang diambil pemerintah terkait penyelesaian isu/permasalahan yang terjadi.

3. Pelaksanaan.

- a. mengatur jalannya kegiatan diskusi.
- b. melakukan pencatatan dari solusi-solusi yang disampaikan
- c. membuat notulen rapat.
- d. menyampaikan notulen kepada peserta diskusi untuk menjadi tindak lanjut.

4. Publikasi.

Publikasi hasil kegiatan diskusi dilakukan melalui media massa dan atau media social.

5. Anggaran

Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Selasa Pariwisata ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB III PPENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam Pelaksanaan Kegiatan Selasa Pariwisata, hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali



Tjok Bagus Pemayun, A.Par.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660907 199903 1 004